

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam menjaga ketertiban masyarakat dan berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan orang yang melaksanakan hak-haknya, misalnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan kepentingan orang lain yang menikmati haknya, misalnya hak untuk bekerja, hak untuk bergerak, hak untuk beristirahat, dan sebagainya. Polisi dalam undang-undang diberi kewenangan dan kekuasaan luas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Polisi berwenang mengatur masyarakat di jalanan, di tempat-tempat umum, serta mengawasi dan memaksa mereka untuk patuh pada aturan sehingga undang-undang berjalan semestinya (Kunarto, 1995).

Fenomena rakyat turun ke jalan untuk menyatakan aspirasi dan pendapat secara terbuka atas topik apapun yang terkait dengan aspirasinya cukup lazim sejak bergulirnya era reformasi di segala bidang di Indonesia. Kegiatan tersebut, rapat umum, mimbar bebas, demonstrasi, merupakan suatu konsekuensi logis dari kebebasan dan demokrasi. Namun sayangnya, dalam kegiatan tersebut seringkali ditandai oleh benturan-benturan fisik antara masyarakat (pendemonstrasi) dengan masyarakat lain atau antara para pendemonstrasi dengan petugas penegak hukum.

Hasil penelitian (Tim Peneliti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2002) menyebutkan bahwa masih ada sebagian anggota sabhara yang tidak mampu

mengelola emosi dan bertindak kasar saat menangani pengunjuk rasa. Dalam aksi unjuk rasa seharusnya aparat kepolisian tidak mudah terpancing dan tetap bisa mengendalikan diri. Massa yang arogan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Kesabaran hati serta adanya kemampuan mengontrol emosi saat menangani pengunjuk rasa akan membuahkan kebaikan, yakni kekerasan tidak terjadi dan bentrokanpun bisa dihindari (Kunarto, 1999).

Polisi yang berniat melakukan pengayoman terhadap unjuk rasa ternyata seringkali tergelincir kepada tindakan-tindakan penindasan, sehingga beberapa orang terpaksa luka-luka dan babak belur akibat tindakan anggota polisi tersebut. Seperti yang terungkap pada wawancara dengan subjek A.T.H., usia 27 tahun, anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) unit pengendalian massa Polres Sukoharjo:

“Kalau untuk memukul dan menendang mas ya, jujur saya pernah melakukan pukulan karena mungkin ya saya sudah emosi mas ya, kalau untuk mela...melakukan pukulan ya mungkin untuk menghilangkan rasa emosi itu saya mungkin cuma satu kali mas, abis itu saya juga tidak karena saya pikir yang melaksanakan unjuk rasa itu kan juga saudara kita, teman kita sendiri, jadi ya...ya sebisa mungkin kita mengendalikan diri mas ya seperti itu”.

Aksi unjuk rasa pada tanggal 03 Agustus 2009 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di depan Gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto Jakarta, berujung ricuh. Empat mahasiswa dilaporkan telah diamankan polisi karena terlibat perkelahian dengan aparat. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Gedung DPR bertujuan untuk menuntut adanya transparansi anggaran negara terkait pidato Presiden Susilo Bambang

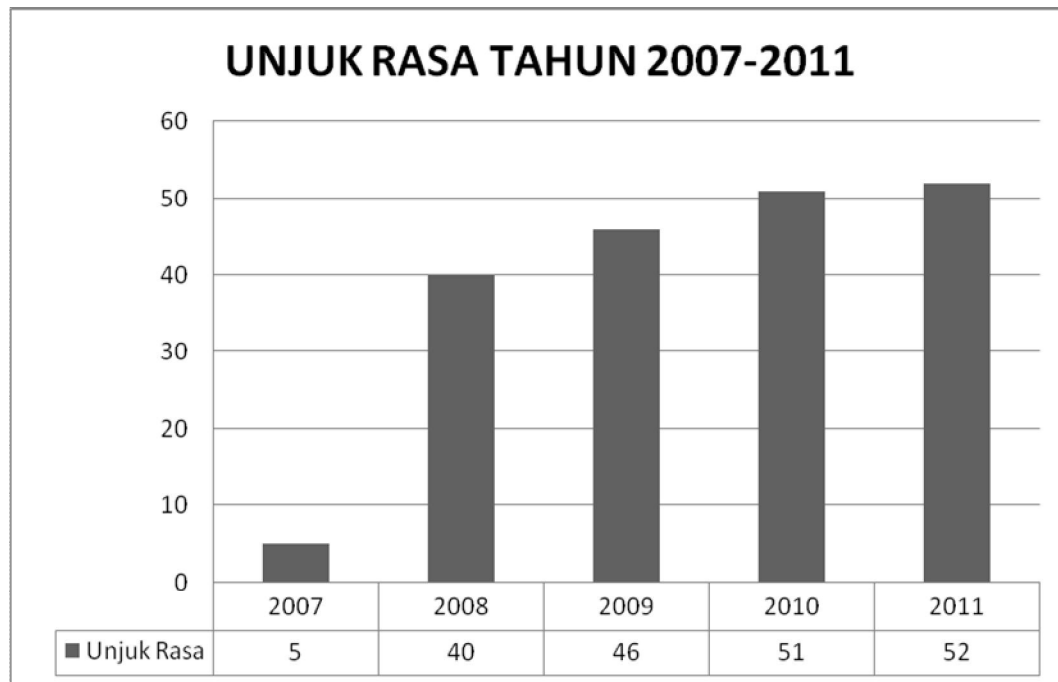
Yudhoyono mengenai RAPBN 2009 dan Nota Keuangannya. Sempat terjadi perkelahian para pengunjuk rasa melakukan perlawanan dan akhirnya dua mahasiswa diamankan polisi dan dibawa ke dalam areal Gedung DPR (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/08/03/33725/Unjuk-Rasa-Mahasiswa-Ricuh-Empat-Orang-Diamankan.>).

Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 10 Februari 2011, aksi demonstrasi di Pertigaan UMS Pabelan Surakarta, saat massa yang terdiri dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) dan Ikatan Muhammadiyah (IMM) se Jateng-DIY mengkritisi pemerintahan SBY-Boediyono serta menuntut diturunkannya kepemimpinan SBY karena dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Polisi memadamkan kobaran api ban mobil yang berasal dari ulah para pengunjuk rasa dan aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan pengunjuk rasapun terjadi (Gingga, 2011).

Menurut Satuan Intelkam Polres Sukoharjo, telah terjadi peningkatan jumlah unjuk rasa khususnya di wilayah hukum Sukoharjo mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Penyajian jumlah disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.

Jumlah Unjuk Rasa yang terjadi di wilayah hukum Sukoharjo



Sumber: Bapak Sukimin selaku Kepala Unit 1 Intelkam Polres Sukoharjo (Tahun 2012).

Sabhara Polri yaitu satuan polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) khususnya fungsi sabhara memiliki tugas dalam mengendalikan massa yang disertai dengan tindakan preventif agar menciptakan situasi yang kondusif dalam mengayomi dan melindungi masyarakat (Anonim, 2006).

Menurut Kunarto (1995) bahwa polisi sebagai pelayan masyarakat harus ramah dan sopan dengan masyarakat yang dilayani termasuk dalam etika, serta semua harus dilayani dengan cepat dan penuh simpati khususnya saat menangani unjuk rasa. Unjuk rasa yang berujung anarkis bukan semata-mata kesalahan dari

pihak kepolisian, tetapi pihak pengunjuk rasa yang mencoba merusak fasilitas umum, menutup lajur kendaraan dan bahkan memukul pihak kepolisian. Dalam menangani unjuk rasa, anggota Sabhara khususnya pasukan pengendalian massa (Dalmas) dilengkapi dengan peralatan khusus seperti helm, tongkat, tali, tameng, penyemprot air, rompi anti peluru, dan gas air mata yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk melumpuhkan, tetapi bukan untuk membunuh atau menyakiti pengunjuk rasa.

Setiap anggota polisi dituntut untuk memiliki sifat-sifat agresif sekaligus penyabar, yang akan menuntun pertimbangannya dalam setiap situasi yang ia hadapi. Kerusuhan dapat diredam dengan penggunaan kekuatan kepolisian dengan perkuatan kompi-kompi pengendali massa, kritik tajam pengunjuk rasa, teriakan-teriakan dianggap penghujatan, karenanya dalam menghadapi kerusuhan seringkali yang menonjol adalah justru balas dendam melalui penggunaan kekerasan yang berlebihan (Ismail, 2001). Seperti yang terungkap pada wawancara dengan subjek A.R., usia 25 tahun, anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) unit pengendalian massa Polres Sukoharjo:

“Ya terkadang kalau emosi yang muncul itu marah kadang kita pingin membalas melempar atau kita pingin memukul”

Kekerasan dan bentrokan yang terjadi antara polisi dengan pengunjuk rasa tidak sepenuhnya menjadi kesalahan polisi. Polisi pengendali massa tetap diperintahkan untuk tenang meskipun massa mulai bersikap anarkis, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang panas (aksi unjuk rasa biasanya berlangsung pada pagi sampai sore hari), sehingga sangat wajar bila kondisi tersebut menyebabkan

beberapa atau sebagian polisi pengendali massa kehilangan kontrol emosi dan menampilkan tindak kekerasan. Sarwono (2001) menyatakan bahwa polisi yang bertugas dalam suhu tinggi (27⁰ C) cenderung lebih berpeluang melakukan tindak kekerasan. Dalam kondisi tegang dan letih, dorongan untuk bertindak tidak tepat akan cenderung muncul (Cooper, 1999). Seperti yang terungkap pada wawancara dengan subjek S.K., usia 57 tahun, Kasat Sabhara (Samapta Bhayangkara) Polres Sukoharjo:

“Terimakasih...biasanya sok kadang ada yang emosinya tinggi, ada yang merasa kecewa karena tersinggung, masalahnya kan mendengar orasi dari murni dari mahasiswa sendiri kan memang ya istilahnya kan nyinggung-nyinggung institusi Polri, lha itu kan namanya kita juga anggota Polri disinggung seperti itu kan sok-sok istilahe yo ngabangke kuping, tapi kalau saya sebagai orang tua yo namanya itu cuma sekilas kritikan hal yang wajar, kita terima dengan wajar itu untuk sebagai koreksi dari anggota Polri sendiri tapi kalau pihak anak muda kan lain, dalam menerima itu kan mungkin karena sudah lelah, sudah puanas, nunggu dari pagi sampai siang, sampai sore itu kan udah emosi dan tahunya kan tidak jangka panjang ata...atau wawasannya kan cuma mendengar sepintas begitu mendengar memang emosi tinggi tapi kan kita sebagai orang tua, sebagai pimpinan kan harus bisa meredakan emosional dari anggota sendiri”.

Menurut Kunarto (1995), unjuk rasa yang berujung bentrokan dapat terhindarkan jika pihak Polisi memiliki pengelolaan emosi yang baik, kesabaran

yang tinggi dan tidak terpancing tindakan yang dilakukan oleh pengunjung rasa. Mengelola emosi ini terlihat dalam hal-hal seperti bagaimana polisi dapat mengendalikan emosinya dalam menangani unjuk rasa, apakah dapat mengelola menjadi emosi positif atau malah menjadi emosi negatif. Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, maka peneliti mengajukan suatu rumusan masalah “Bagaimana pengelolaan emosi pada para petugas kepolisian khususnya pada anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) dalam menangani unjuk rasa?”.

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan judul “Pengelolaan Emosi pada Anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) Dalam Menangani Unjuk Rasa”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan emosi pada anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) dalam menangani unjuk rasa.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pimpinan Polres Sukoharjo, akan mendapatkan tambahan informasi bagi pimpinan Polres Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas personilnya terutama dalam mengelola emosi agar dalam bekerja dapat mengurangi munculnya tindak kekerasan saat menangani unjuk rasa.

2. Bagi Anggota Sabhara Polres Sukoharjo, akan mendapatkan gambaran bagi anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo sehingga dapat mengelola emosinya dalam bekerja khususnya saat menangani unjuk rasa.
3. Bagi Masyarakat, akan mendapatkan wawasan mengenai pengelolaan emosi dan tindakan yang dilakukan oleh anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo dalam menangani unjuk rasa.
4. Bagi Peneliti Lain, akan mendapatkan masukan dan pengetahuan serta mendorong ilmuwan psikologi khususnya psikologi sosial untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengelolaan emosi pada anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) dalam menangani unjuk rasa.